

BAB V

KESIMPULAN

Selama lebih dari lima dekade Amerika Serikat gagal mengendalikan pengembangan program nuklir Korea Utara. Padahal Amerika Serikat dinilai sebagai negara yang agresif dalam merespon setiap ancaman. Negara adidaya ini memiliki *track record* yakni sering mengencarkan serangan *pre-emptive* terhadap musuh-musuhnya. Dalam beberapa kasus berlatarbelakang pengembangan senjata pemusnah massal, Amerika Serikat telah melancarkan agresi terhadap negara-negara seperti Irak, Suriah, dan Afganistan.

Kebijakan ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan terhadap Korea Utara. Di mana rezim Korea Utara telah terbukti memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Tidak hanya sebatas itu, negara diktaktor ini telah mencapai perkembangan yang signifikan. Sejak tahun 2006 hingga 2017, Korea Utara telah berhasil melakukan uji coba nuklir sebanyak 6 kali. Di tambah dalam setiap percobaan negara ini berhasil menciptakan nuklir dengan daya ledak yang semakin besar. Hal ini dipastikan menjadi ancaman yang mengkhawatirkan untuk Amerika Serikat sebagai musuh utamanya.

Namun terhitung sejak kepemimpinan Presiden Nixon hingga Presiden Trump Amerika Serikat tidak pernah memberikan kebijakan agresi militer terhadap Korea Utara. Selama beberapa dekade pihak Amerika Serikat masih mengandalkan upaya diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral. Serta melalui kebijakan pemberian sanksi-sanksi ekonomi yang difungsikan untuk menekan posisi Korea Utara agar segera menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. Walaupun upaya-upaya tersebut terbukti belum bisa menghentikan langkah Korea Utara namun pemerintahan Donald Trump sampai saat ini masih mengandalkan kebijakan *soft power*. Sehingga dianalisis pemerintah Amerika Serikat memang menghindari kebijakan agresi militer terhadap rezim Kim Jong Un.

Adapun alasan mengapa Pemerintah Amerika Serikat tidak melakukan serangan militer langsung terhadap rezim Korea Utara telah dianalisis dan dapat dibuktikan melalui Model Aktor Rasional. Teori milik Graham T. Allison ini menjelaskan bahwa keputusan yang dijadikan sebagai kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari rasionalisasi dari pemerintah monolit. Di mana kebijakan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang jelas. Suatu keputusan ditentukan melalui penyaringan alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia, yakni melalui pertimbangan untung-rugi. Sehingga kebijakan luar negeri yang diambil Amerika Serikat terhadap Korea Utara merupakan bentuk dari optimalisasi hasil dari pemilihan alternatif keputusan.

Alasan pertama yang melatarbelakangi keputusan Pemerintah Amerika Serikat untuk tidak menyerang Korea Utara adalah menghindari resiko *Massive Retaliation* (Pembalasan besar-besaran). Sesuai dengan bukti yang telah dibahas Korea Utara akan melakukan serangan balasan besar jika Amerika Serikat memulai serangan terlebih dahulu. Namun Korea Utara akan menjadi negara nuklir yang bertanggung jawab jika Amerika Serikat mengakui mereka sebagai negara nuklir legal. Serangan balasan tersebut juga akan menyertakan teknologi rudal dan nuklir. Dimana telah diketahui rudal Kim Jong Un, yakni Taepodong 2 memiliki jangkauan sebagian besar dataran Amerika Serikat.

Keuntungan yang kedua adalah menghindarkan dua sekutu AS yakni Korea Selatan dan Jepang menjadi korban. Faktor letak geografis yang berdekatan membuat kedua negara ini akan menjadi korban paling rentan. *Pre-emptive strike* yang sering dilakukan terhadap musuh-musuh Amerika Serikat kali ini tidak sesuai untuk diterapkan terhadap Korea Utara. Jarak kota Pyongyang yang hanya berkisar 300 km terhadap Seoul, serta jarak 800 km terhadap Tokyo menimbulkan resiko banyaknya korban sipil atas perang tersebut. Diketahui Korea Utara baru saja berhasil meluncurkan uji coba rudal melewati wilayah udara Hokkaido. Hal ini membuat posisi Jepang semakin terancam. Di tambah Korea Utara memiliki

pertahanan pasukan artileri kuat di sepanjang zona Demiliterasi yang berpotensi menembakkan serangan sewaktu-waktu terhadap Korea Selatan. Sesuai dengan perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan di mana Amerika Serikat berkewajiban untuk menjamin dan melindungi kedua negara sekutu tersebut dari ancaman eksternal.

Alasan yang ketiga yakni Amerika Serikat tidak mendapat kecaman dari PBB. Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenderal Antonio Guterres mengeluarkan peringatan keras kepada Donald Trump untuk tidak memulai perang nuklir dengan Korea Utara dalam pidato pembukaan Majelis Umum PBB 2017. PBB menekankan agar Presiden Trump tidak membuat kestabilan dunia semakin memburuk dan tetap mengutamakan perdamaian dunia.

Sehingga berdasarkan beberapa alasan diatas, dimana alasan ini dijadikan pertimbangan atas penangguhan serangan terhadap provokasi nuklir Korea Utara. Karena berdasarkan proses rasionalisi pemilihan kebijakan menggunakan Model Aktor Rasional milik Graham T. Alisson, opsi tidak melakukan penyerangan terhadap rezim Kim Jong Un lebih banyak menimbulkan konsekuensi keuntungan. Sehingga hal ini menjawab mengapa Pemerintah Amerika Serikat melakukan tindakan non agresi terhadap Korea Utara, dengan masih mengusahakan jalan diplomasi dan sanksi.